

Dampak Pembangunan Sirkuit Mandalika Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Asongan di Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)

Hardiansyah Hardiansyah, Annisya Fitriani
Universitas Nasional, Indonesia

Email: hardiansyahardi50@gmail.com, annisyafitriani1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang asongan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan penelitian, berita media, dan dokumen resmi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kesejahteraan kelompok ekonomi informal yang jarang dilibatkan dalam evaluasi dampak proyek pariwisata berskala internasional, khususnya melalui perspektif teori stakeholder dan Corporate Social Responsibility (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Sirkuit Mandalika membawa dampak positif berupa peningkatan peluang ekonomi pada saat event internasional, tetapi juga memunculkan tantangan berupa penurunan pendapatan harian dan keterbatasan ruang usaha bagi pedagang asongan. Keterlibatan pedagang asongan sebagai stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih sangat minim sehingga kebutuhan mereka kurang terakomodasi. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan pihak pengembang melalui pelatihan, pembentukan paguyuban, dan penyediaan lokasi usaha alternatif menunjukkan langkah positif, namun implementasinya belum merata dan belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan pedagang. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pembangunan inklusif yang mempertimbangkan kesejahteraan pelaku ekonomi informal sebagai bagian integral dari perencanaan proyek pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat lokal.

Kata kunci: Sirkuit Mandalika, pedagang asongan, stakeholder, Corporate Social Responsibility (CSR), kesejahteraan masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Mandalika Circuit development on the social and economic conditions of street vendors in Kuta Village, Pujut District, Central Lombok, West Nusa Tenggara. A qualitative approach was employed using literature studies from various sources such as journals, research reports, media coverage, and official documents. The novelty of this research lies in its focus on analyzing the welfare of informal economic groups rarely involved in evaluating the impact of international-scale tourism projects, specifically through the perspective of stakeholder theory and Corporate Social Responsibility (CSR). The results show that the construction of the Mandalika Circuit has had a positive impact in the form of increased economic opportunities during international events, but also presented challenges in the form of decreased daily income and limited business space for street vendors. The involvement of street vendors as stakeholders in the planning and implementation process of the development is still very minimal, resulting in inadequate accommodation for their needs. The Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by the developer through training, the formation of associations, and the provision of alternative business locations shows positive progress, but its implementation has not been evenly distributed and has not fully improved the welfare of street vendors. This research contributes to the development of an inclusive development model that considers the welfare of informal economic actors as an integral part of sustainable tourism project planning. This study emphasizes the importance of a more inclusive and sustainable development approach so that the benefits of development can be felt by the entire local community.

Keywords: Mandalika Circuit, street vendors, stakeholders, Corporate Social Responsibility (CSR), community welfare



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur berskala besar kerap menjadi simbol kemajuan dan modernisasi suatu wilayah. Salah satu proyek strategis nasional yang mencerminkan hal tersebut adalah pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan olahraga internasional, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal (Damyanti & Indriani, 2021; Fajarica et al., 2022; Frederick et al., 2022; Meri, 2020; Selvia et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, pembangunan seperti ini sering kali menimbulkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, terutama terhadap kelompok masyarakat kecil seperti pedagang asongan yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata tradisional. Dalam konteks tersebut, konsep stakeholder menjadi relevan untuk dianalisis.

Stakeholder tidak hanya mencakup investor, pemerintah, dan pengembang proyek, tetapi juga masyarakat lokal yang terdampak langsung, termasuk pedagang asongan. Menurut teori stakeholder, setiap pihak yang terlibat atau terkena dampak dari keputusan organisasi atau proyek pembangunan harus diberi perhatian yang proporsional. Pedagang asongan, sebagai stakeholder minoritas, sering kali tidak mendapatkan ruang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga rawan mengalami marginalisasi (Fuadah & Hakimi, 2020; Permatasari & Setyastrini, 2019).

Selanjutnya, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa pembangunan Sirkuit Mandalika tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat. CSR dalam hal ini tidak sebatas kegiatan amal atau bantuan sesaat, tetapi melibatkan komitmen jangka panjang terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan kerja, relokasi yang manusiawi, dan akses terhadap peluang ekonomi yang baru (Ajayi & Mmutle, 2020; Rohyati & Suropto, 2021; Susanto & Ardini, 2016; Van Der Merwe & Al Achkar, 2022). Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pelaksanaan CSR dalam pembangunan Sirkuit Mandalika telah memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan pedagang asongan sebagai bagian dari masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak pembangunan Sirkuit Mandalika dari berbagai perspektif. Frederick et al. (2022) menganalisis pengaruh pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap perekonomian Lombok secara makro, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi regional dan sektor pariwisata. Rahmatika (2024) meneliti dampak pembangunan wisata sport tourism Pertamina Mandalika International Circuit dalam aspek ekonomi, namun lebih menekankan pada kontribusi terhadap PDRB dan investasi daerah. Fortuna (2025) mengkaji perubahan sosial masyarakat Desa Kuta pasca pembangunan sirkuit dalam perspektif teori sistem, mengidentifikasi transformasi struktur sosial dan pola interaksi masyarakat. Sementara itu, Rifki & Sumilih (2024) mengeksplorasi adaptasi sosial budaya masyarakat Sasak terhadap keberadaan Sirkuit Mandalika, dengan penekanan pada aspek kultural dan identitas lokal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menyoroti aspek ekonomi makro, perubahan sosial struktural, atau adaptasi budaya secara umum, studi ini berfokus pada dampak mikro sosial-ekonomi terhadap pedagang asongan sebagai pelaku ekonomi informal yang mengalami marginalisasi langsung akibat pembangunan. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis keterlibatan stakeholder dan implementasi CSR sebagai instrumen pemberdayaan, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks pedagang asongan di kawasan Mandalika. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap kesejahteraan sosial kelompok informal yang jarang dilibatkan dalam evaluasi proyek pariwisata berskala

internasional, serta analisis kritis terhadap efektivitas program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial- ekonomi dari pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap kehidupan pedagang asongan di sekitar proyek. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proyek pembangunan besar dapat dijalankan secara inklusif dengan melibatkan seluruh stakeholder, serta bagaimana prinsip-prinsip CSR dapat diimplementasikan secara nyata demi mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji dampak pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap kesejahteraan pedagang asongan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama bagaimana kelompok masyarakat kecil mengalami dan merespons perubahan sosial-ekonomi yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur skala besar. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam kehidupan pedagang asongan pasca pembangunan Sirkuit Mandalika.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang dipublikasikan antara tahun 2019-2025, meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku referensi pembangunan pariwisata berkelanjutan, laporan penelitian akademik, dokumen kebijakan pemerintah daerah dan pusat terkait KEK Mandalika, berita media massa nasional dan lokal, serta publikasi resmi dari pengelola kawasan Mandalika (ITDC) dan lembaga terkait seperti Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Pemilihan rentang waktu publikasi difokuskan pada periode 2019-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas data terkait dengan fase perencanaan, pembangunan, hingga operasional Sirkuit Mandalika. Sebanyak 20 sumber primer dan sekunder digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian ini.

Studi literatur ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: kondisi sosial ekonomi pedagang asongan sebelum dan sesudah pembangunan, peran stakeholder dalam proses pembangunan, dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis (analisis isi) melalui beberapa tahapan sistematis: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah dari berbagai sumber literatur; (2) coding tematik, yakni pengkodean data berdasarkan tema-tema utama penelitian (dampak sosial-ekonomi, keterlibatan stakeholder, dan implementasi CSR); (3) kategorisasi, yaitu pengelompokan data ke dalam kategori-kategori analitis yang relevan dengan kerangka teori stakeholder dan CSR; dan (4) interpretasi, yaitu pemaknaan pola, makna, dan hubungan antar variabel yang diteliti dalam konteks kesejahteraan masyarakat terdampak.

Keabsahan data diperkuat melalui metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis sumber data. Triangulasi dilakukan dengan cara: (1) membandingkan temuan dari jurnal akademik peer-reviewed dengan laporan resmi pemerintah untuk memvalidasi data faktual terkait kebijakan dan program pembangunan; (2) mengkonfirmasi data kualitatif dari berita media dengan publikasi resmi ITDC untuk memastikan akurasi informasi mengenai implementasi program CSR; dan (3)

mengintegrasikan perspektif dari berbagai stakeholder (pemerintah, pengembang, masyarakat) melalui analisis dokumen dan publikasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang mengenai dampak pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap pedagang asongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan Sirkuit Mandalika Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi

Pembangunan Sirkuit Mandalika membawa dampak besar terhadap kondisi sosial pedagang asongan di Desa Kuta. Sebelum proyek dimulai, pedagang asongan telah lama beraktivitas di kawasan wisata pantai dan jalanan umum yang kini menjadi bagian dari kawasan sirkuit. Dengan adanya penataan wilayah dan pengamanan area sekitar sirkuit, ruang gerak pedagang menjadi lebih terbatas. Banyak di antara mereka yang kehilangan tempat berjualan karena dianggap mengganggu estetika dan ketertiban kawasan wisata premium. Menurut teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984), situasi ini mencerminkan kegagalan proyek dalam menerapkan prinsip keterlibatan partisipatif, di mana kepentingan stakeholder minoritas seperti pedagang asongan tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial antara warga lokal dengan pengelola kawasan, serta memperkuat rasa ketidakadilan dan keterpinggiran sosial.

Secara ekonomi, sebagian besar pedagang asongan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama saat pembangunan berlangsung dan akses ke kawasan dibatasi. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan rata-rata pendapatan pedagang asongan sebelum dan sesudah pembangunan Sirkuit Mandalika:

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Pedagang Asongan Sebelum dan Sesudah Pembangunan Sirkuit Mandalika

Periode	Hari Kerja	Akhir Pekan	Event Internasional
Sebelum Pembangunan	Rp 50.000 - Rp 200.000	Rp 100.000 - Rp 300.000	Rp -
Pasca Pembangunan (Reguler)	Rp 10.000 - Rp 150.000	Rp 50.000 - Rp 500.000	Rp 100.000 - Rp 900.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber literatur (Frederick et al., 2022; Rahmatika, 2024)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada saat event internasional seperti MotoGP dan WSBK, pendapatan harian pedagang pada hari kerja justru mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak positif dari event internasional bersifat sementara dan sporadis, menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi jangka pendek yang belum berkelanjutan. Ketimpangan ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan Sirkuit Mandalika belum mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi pedagang asongan.

Meskipun terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dan event internasional seperti MotoGP, tidak semua pelaku usaha lokal dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. Banyak pengunjung yang lebih banyak mengakses area yang dikelola secara formal oleh pihak pengembang dan pemerintah, sementara pedagang kecil tidak mendapatkan tempat yang

strategis untuk menjajakan barang dagangannya. Ketimpangan ekonomi pun makin terasa antara pelaku usaha besar dan masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada ekonomi informal.

Namun demikian, pembangunan Sirkuit Mandalika juga membuka potensi baru jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif. Dalam beberapa kasus, ada inisiatif dari pihak pemerintah daerah maupun BUMN yang terlibat untuk memberikan pelatihan, pendampingan, atau relokasi usaha secara lebih terstruktur. Sayangnya, program-program ini belum sepenuhnya merata dan belum menyentuh seluruh pedagang asongan secara adil. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan pihak investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang menjadi bagian penting dari ekosistem sosial-ekonomi Mandalika.

Pada sisi sosial, pedagang asongan lokal mengalami perubahan cepat dalam akses dan ruang aktivitas ekonomi. Sebelum WSBK 2022, sekitar 150 lapak pedagang asongan telah berdiri di sekitar area sirkuit dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi lokal. Namun, lapak-lapak tersebut kemudian direlokasi oleh ITDC ke lokasi baru, yakni Bazar Mandalika di sisi selatan Masjid Nurul Bilad, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan. Relokasi ini memang bertujuan menjaga estetika dan keamanan kawasan, tetapi bagi para pedagang sering kali berarti kehilangan lokasi strategis yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama—itu memicu keresahan sosial dan rasa ketidakpastian ekonomi.

Analisis terhadap dampak relokasi ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan: di satu sisi, pembangunan Sirkuit Mandalika bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata; di sisi lain, kebijakan relokasi tanpa perencanaan transisi yang matang justru menciptakan kerentanan ekonomi baru bagi pedagang asongan. Hal ini sejalan dengan temuan Helianolita et al. (2025) yang mengidentifikasi adanya pelanggaran hak masyarakat adat dalam proyek Mandalika, termasuk hak atas mata pencaharian yang layak. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata harus disertai dengan mekanisme perlindungan sosial yang memadai untuk mencegah marginalisasi kelompok rentan.

Dari sisi ekonomi, data survei lapangan menunjukkan variasi pendapatan pedagang cukup signifikan. Rata-rata pendapatan harian pedagang asongan sebelum dan pasca pembangunan berbeda secara tajam: pada hari kerja hanya Rp 10.000–Rp 150.000, meningkat menjadi Rp 50.000–Rp 500.000 saat akhir pekan, dan bahkan mencapai Rp 100.000–Rp 900.000 pada event besar Sirkuit Mandalika seperti MotoGP dan WSBK. Dengan demikian terlihat bahwa event internasional memberi dampak sementara yang positif, tetapi hanya sebagian pedagang yang memperoleh manfaat karena lokasi bazar yang sepi pengunjung dibanding area pantai.

Namun, upaya pemberdayaan melalui CSR semakin digaungkan. ITDC bersama Yayasan Gugah Nurani Indonesia membentuk paguyuban pedagang asongan melalui diskusi FGD pada September 2023 untuk meningkatkan koordinasi, advokasi, dan pendataan pedagang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu pelatihan tenaga kerja lokal, pengangkatan marshall, hingga akses kerja di hotel dan pengamanan juga dibuka bagi warga Desa Kuta, menunjukkan upaya integrasi langsung dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, implementasi program ini masih belum menyentuh

seluruh pedagang asongan dan belum sepenuhnya menggantikan ruang ekonomi informal yang hilang akibat relokasi.

Keterlibatan Pedagang Asongan Sebagai Stakeholder Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Sirkuit Mandalika

Dalam teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984), setiap pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan atau proyek pembangunan memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa legitimasi dan keberlanjutan suatu proyek sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder, termasuk kelompok minoritas yang rentan mengalami marginalisasi. Namun, dalam konteks pembangunan Sirkuit Mandalika, pedagang asongan di Desa Kuta—yang merupakan bagian dari masyarakat lokal—tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam proses perencanaan awal. Proyek Mandalika lebih banyak didorong oleh kepentingan nasional dan investor, sehingga proses konsultasi publik sering kali dilakukan secara terbatas dan hanya melibatkan pemangku kepentingan besar seperti pemerintah daerah, BUMN (seperti ITDC), dan investor swasta. Pedagang asongan, yang merupakan pelaku ekonomi informal, cenderung dianggap sebagai pihak pinggiran yang kurang strategis dalam pengambilan keputusan.

Marginalisasi pedagang asongan dalam proses pengambilan keputusan ini mencerminkan kegagalan proyek dalam menerapkan prinsip keterlibatan partisipatif sebagaimana ditekankan dalam teori stakeholder Freeman (1984). Ketidadaan mekanisme konsultasi yang inklusif menyebabkan kepentingan pedagang asongan tidak terakomodasi dalam desain dan implementasi proyek, sehingga mereka menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak negatif pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Fortuna (2025) yang mengidentifikasi perubahan sosial signifikan pada masyarakat Desa Kuta pasca pembangunan sirkuit, di mana kelompok ekonomi informal mengalami dislokasi sosial dan ekonomi yang tidak direncanakan dengan baik.

Minimnya keterlibatan ini terlihat dari respons masyarakat terhadap relokasi paksa lapak pedagang pada 2022, yang dilakukan tanpa skema transisi yang memadai. Meskipun lokasi pengganti seperti Bazar Mandalika telah disiapkan, banyak pedagang mengeluhkan minimnya pengunjung di area tersebut karena tidak berada di titik strategis. Hal ini menunjukkan bahwa suara dan kebutuhan pedagang asongan tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam desain dan pengelolaan kawasan. Mereka lebih sering menjadi objek pembangunan daripada subjek yang diajak bermitra. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi yang memadai sebelum tindakan penertiban dilakukan, yang memperlihatkan lemahnya mekanisme partisipatif dalam proses pembangunan tersebut.

Meski demikian, beberapa upaya untuk melibatkan pedagang asongan sebagai stakeholder mulai terlihat pasca pelaksanaan event-event besar di Mandalika. Pada 2023, ITDC bekerja sama dengan lembaga sosial membentuk Paguyuban Pedagang Asongan Mandalika, yang bertujuan sebagai wadah komunikasi, advokasi, dan pendataan pedagang lokal. Melalui forum ini, pedagang mulai mendapatkan akses terhadap informasi, pelatihan, serta program pemberdayaan dari program CSR. Namun, inisiatif ini masih tergolong reaktif dan belum merupakan bagian dari skema partisipatif yang terstruktur sejak awal. Ke depan, agar

pembangunan benar-benar berkeadilan sosial, keterlibatan pedagang asongan sebagai stakeholder perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pasca pembangunan.

Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Pihak Pengembang Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Asongan Di Sekitar Kawasan Sirkuit Mandalika

Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) di kawasan Sirkuit Mandalika dilakukan oleh pihak pengembang utama, yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal yang terdampak. Dalam beberapa tahun terakhir, ITDC mulai menggandeng lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) untuk melakukan pemetaan sosial, pelatihan usaha kecil, dan advokasi terhadap kelompok rentan, termasuk pedagang asongan. Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah pembentukan Paguyuban Pedagang Asongan Mandalika pada tahun 2023, yang bertujuan memperkuat posisi pedagang dalam forum komunikasi dengan pengelola kawasan dan mendorong upaya pemberdayaan ekonomi secara kolektif.

Meskipun program CSR ini menunjukkan itikad positif, implementasinya masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya jangkauan program terhadap seluruh pedagang asongan, serta minimnya keberlanjutan program yang dirancang. Banyak pedagang yang belum memperoleh manfaat langsung, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, atau fasilitas berjualan yang layak di lokasi strategis. Program relokasi ke Bazar Mandalika, misalnya, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan ekonomi pedagang karena lokasi tersebut kurang ramai pengunjung dan tidak terintegrasi dengan arus wisatawan utama di kawasan sirkuit. Hal ini menimbulkan kesan bahwa CSR lebih bersifat formalitas daripada benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Analisis kritis terhadap implementasi CSR ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep CSR sebagai instrumen pemberdayaan berkelanjutan dengan praktik di lapangan yang cenderung bersifat charity-oriented dan jangka pendek. Menurut konsep CSR yang dikemukakan oleh Carroll (1991), tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mencakup aspek filantropi, tetapi juga tanggung jawab ekonomi, legal, dan etis yang terintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Dalam konteks Sirkuit Mandalika, program CSR yang dilakukan ITDC belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan holistik tersebut, karena masih terbatas pada program-program ad hoc yang belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kawasan secara keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan kritik Rifki & Sumilih (2024) yang menyoroti bahwa meskipun terdapat upaya adaptasi sosial budaya masyarakat Sasak terhadap keberadaan Sirkuit Mandalika, proses adaptasi ini lebih bersifat reaktif daripada proaktif, dan belum didukung oleh program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, program CSR yang ada saat ini masih perlu dievaluasi dan direformulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil pedagang asongan dan mampu menciptakan dampak pemberdayaan yang berkelanjutan.

Untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan, CSR dari pengembang perlu diarahkan pada pendekatan partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis

kebutuhan lokal. Ini mencakup pelibatan pedagang dalam perencanaan program, penyediaan tempat usaha yang layak dan strategis, pelatihan kewirausahaan, serta akses kepada pemasaran digital dan jaringan wisata. Selain itu, evaluasi rutin terhadap efektivitas program CSR harus dilakukan secara transparan agar dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terus berubah. Dengan demikian, CSR tidak hanya menjadi alat legitimasi sosial, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tengah pembangunan kawasan wisata internasional seperti Mandalika. Tabel 2 berikut merangkum program-program CSR yang telah dilaksanakan oleh ITDC dan evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang asongan:

Tabel 2. Program CSR ITDC dan Evaluasi Dampaknya terhadap Pedagang Asongan

Program CSR	Tahun Implementasi	Target	Capaian	Evaluasi Dampak
Pembentukan Paguyuban Pedagang Asongan	2023	150 pedagang	80 pedagang terdaftar	Koordinasi meningkat, namun belum semua pedagang terlibat aktif
Pelatihan Kewirausahaan & Manajemen Usaha	2023-2024	100 pedagang	45 pedagang terlatih	Peningkatan kapasitas terbatas, belum berdampak signifikan pada pendapatan
Relokasi ke Bazar Mandalika	2022	150 lapak	60 lapak aktif	Lokasi kurang strategis, penurunan pengunjung hingga 60%
Pelatihan Tenaga Marshall & Hospitality	2022-2024	50 orang	30 orang terserap	Membuka peluang kerja alternatif, namun tidak semua pedagang tertarik
Akses Permodalan Usaha Kecil	2024	50 pedagang	15 pedagang menerima	Jangkauan sangat terbatas, proses administrasi kompleks

Sumber: Diolah dari berbagai sumber literatur dan publikasi ITDC (2022-2024)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun ITDC telah melaksanakan berbagai program CSR, tingkat capaian dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang asongan masih jauh dari target yang ditetapkan. Program pembentukan paguyuban dan pelatihan kewirausahaan menunjukkan capaian yang relatif rendah (53% dan 45% dari target), mengindikasikan adanya hambatan dalam sosialisasi, aksesibilitas, atau relevansi program dengan kebutuhan pedagang. Program relokasi ke Bazar Mandalika, yang seharusnya menjadi solusi utama bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha, justru mengalami tingkat utilisasi yang sangat rendah (40% dari kapasitas) akibat lokasi yang kurang strategis. Sementara itu, program akses permodalan hanya menjangkau 30% dari target, menunjukkan adanya kendala struktural dalam implementasi program.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa program CSR yang dilaksanakan ITDC masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang komprehensif. Diperlukan reformulasi pendekatan CSR dari model charity-based menjadi empowerment-based, yang menekankan pada partisipasi aktif pedagang dalam perencanaan program, pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, dan pembangunan

kapasitas berkelanjutan yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi wisata di kawasan Mandalika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Sirkuit Mandalika membawa dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan pedagang asongan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Secara sosial dan ekonomi, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan dan keterbatasan ruang usaha akibat relokasi dan pembatasan akses. Keterlibatan mereka sebagai stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek masih sangat minim, sehingga suara dan kepentingan mereka kurang terakomodasi. Meskipun pihak pengembang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan, seperti pembentukan paguyuban dan pelatihan, implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan pedagang secara merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan agar pembangunan kawasan Mandalika benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat lokal, termasuk pelaku ekonomi informal seperti pedagang asongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, O. A., & Mmutle, T. (2020). Corporate reputation through strategic communication of corporate social responsibility. *Corporate Communications: An International Journal*, 26(5). <https://doi.org/10.1108/CCIJ-02-2020-0047>
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Damyanti, S., & Indriani, I. (2021). Dampak pembangunan sirkuit Kuta Mandalika terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di tinjau dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 1(3).
- Fajarica, S. D., Teluma, A. R. L., & Safitri, B. V. (2022). Persepsi masyarakat sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terhadap informasi publik pembangunan Sirkuit MotoGP. *JCommsci: Journal of Media and Communication Science*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.167>
- Fortuna, B. D. (2025). *Perubahan sosial pada masyarakat Desa Kuta pasca pembangunan Sirkuit Mandalika dalam perspektif teori sistem (Studi di Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)* [Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang].
- Frederick, B., Tjoandra, M., Liu, M., Jayawardhana, I., Reynara, S. D., & Warganegara, A. G. (2022). Pengaruh pembangunan Sirkuit Mandalika terhadap perekonomian Lombok. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(2), 99–108.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Fuadah, N., & Hakimi, F. (2020). Financial performance dan market share pada bank umum syariah devisa Indonesia: Perspektif teori stakeholder. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2). <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656>
- Helianolita, V., Gerrits, D. A., & Fauzi, T. F. A. (2025). Penggusuran dan hak masyarakat adat: Analisis pelanggaran HAM dalam proyek Mandalika. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). (2023). *Laporan tahunan program pemberdayaan masyarakat kawasan Mandalika 2022–2023*. Jakarta: ITDC.
- Meri, S. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Sirkuit Mandalika (Studi penelitian di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)* [Undergraduate thesis].
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, N. L. P. (2019). Faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di negara maju dan berkembang: Bukti empiris teori legitimasi dan teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.2559>

- Rahmatika, B. D. A. (2024). Dampak pembangunan wisata sport tourism Pertamina Mandalika International Circuit dalam aspek ekonomi. *TEHBMJ (Tourism Economics Hospitality and Business Management Journal)*, 4(1), 7–12.
- Rifki, I., & Sumilih, D. A. (2024). Adaptasi sosial budaya masyarakat Sasak terhadap keberadaan Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 2(2), 1–10.
- Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Selvia, S. I., Susilowati, L. E., & Iemaaniah, Z. M. (2023). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendampingan pengolahan pangan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngolang sebagai salah satu desa penyangga KEK Mandalika yang terdampak pembangunan Sirkuit Mandalika. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.454>
- Susanto, C. M., & Ardini, L. (2016). Pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(7).
- Van Der Merwe, J., & Al Achkar, Z. (2022). Data responsibility, corporate social responsibility, and corporate digital responsibility. *Data & Policy*, 4(2). <https://doi.org/10.1017/dap.2022.2>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).